

Kritik Sosial Pers terhadap Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia

Benar Kondang Wijaksono¹, Eka Nada Shofa Alkhajar^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Abstract

Editorial is a main article that reflects the views and opinions of a newspaper. Newspapers as the press can write social criticism regarding an issue to carry out its normative function as a tool of social control. Using the perspective of (Abar, 1997), this study analyzes the findings of social criticism in the editorial text of the print newspaper Media Indonesia. The main focus of the analysis is social criticism related to the handling of corruption cases in Indonesia. Handling corruption cases includes prevention, disclosure of cases, and prosecution or law enforcement. In its aim to find social criticism regarding the handling of corruption cases in Indonesia, the research method used is qualitative content analysis. By collecting data through observation and documentation of editorial texts by Media Indonesia at the National Press Monument. Researchers continued to take samples using the purposive sampling method. This research captures that: (1) Indonesian media pays attention to the handling of corruption cases in Indonesia. This attention is shown by the social criticism related to this matter written in the editorial text. (2) Indonesian media conveys social criticism accompanied by arguments and solutions. Social criticism is not written directly and avoids conflict with the government so it is included in the middle way model.

Keywords:

Editorial, Newspaper, Social Criticism, Corruption Cases

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah yang kronis bagi negara Indonesia. Masalah ini sudah ada sejak lama, namun juga belum bisa sepenuhnya diatasi lewat penegakan hukum di Indonesia. Menurut Putra & Linda (2022), tindakan korupsi menjadi ancaman bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak hanya itu, korupsi juga telah membawa kerugian materil dengan jumlah besar bagi keuangan negara. Uang negara yang seharusnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, malah dipakai untuk kepentingan pribadi pelakunya.

Indonesia sendiri memiliki CPI sebesar 34 dari 100 pada tahun 2023. Skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara yang ada dan dievaluasi. Skor di tahun 2023 ini juga sama sekali tidak berubah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2022. Dalam data terbaru yang telah dikeluarkan yakni pada tahun 2024, skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 poin menjadi 37.

^{1*} Corresponding Author: Eka Nada Shofa Alkhajar, ekanadashofa@staff.uns.ac.id

Hal ini membuat peringkat Indonesia mengalami kenaikan juga menjadi 99 dari total negara masih sama yaitu 180. Kendati demikian, Indonesia masih berada di urutan bawah dari daftar negara-negara yang ada untuk urusan bersihnya negara dari kasus korupsi. Dengan kata lain, Indonesia masih dipersepsi sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk.

Melihat dari data diatas, penanganan kasus korupsi di Indonesia terus menemui tantangan dan hambatan di samping karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bukti hingga Maret tahun 2025 saja, sudah ada beberapa tindakan korupsi yang terungkap. Menurut berita yang diluncurkan oleh Tempo.co, kasus korupsi di awal tahun 2025 merugikan negara hingga triliunan rupiah dan melibatkan pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha mulai dari PT Pertamina, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), bahkan dari bidang perbankan. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan bagi upaya penanganan kasus korupsi di Indonesia. Korupsi terus menggerogoti bangsa Indonesia tak hanya merugikan dalam jumlah uang namun juga menghambat pembangunan bahkan mencederai rasa keadilan. Tindakan korupsi yang terus menerus terjadi dengan nilai kerugian bernilai fantastis hingga triliunan rupiah mengindikasikan penanganan kasus korupsi yang masih belum berhasil.

Penanganan kasus korupsi di Indonesia masih belum dikatakan berhasil karena tindakan ini sudah dalam mengakar dalam ranah pemerintahan, institusi, bahkan pada sosial dan budaya di masyarakat. Bahkan tindakan ini sudah mulai dilakukan sejak usia muda dalam lingkup keluarga. Tindakan korup menjadi kebiasaan dan terus berkembang tidak segera dicegah. Padahal Indonesia sendiri memiliki lembaga penegakan hukum yang terbilang komplit dalam urusan menangani kasus korupsi. Terdapat lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menumpas korupsi. Hukum yang ada seharusnya dijalankan tanpa memandang jabatan atau status sosial termasuk kepada pelaku korupsi. Dengan kata lain, tidak ada lagi istilah bahwa hukum "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Namun nyatanya hukum yang ada masih lemah dan tidak efektif diimplementasikan.

Ragu untuk mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia berjalan lancar jika melihat banyaknya tindakan korup dan celah-celah untuk melakukan korupsi di Indonesia itu sendiri. Keberadaan lembaga penegak hukum dan implementasi hukum itu sendiri dinilai tidak cukup untuk menumpas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Penanganan kasus korupsi di Indonesia harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang menginginkan masa depan yang lebih cerah. Tidak terkecuali bagi media massa dalam hal ini sebagai alat kontrol sosial. Media massa dapat mempengaruhi masyarakat karena dalam era sekarang, media massa seperti surat kabar cetak bukan hanya menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat semata namun juga menghasilkan pandangan, opini, bahkan kritik sosial terkait isu tertentu (Wicaksana & Alkhajar, 2024). Dalam hal ini surat kabar cetak menghasilkan kritik sosial terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Menurut Abar (1997, p. 45), menyatakan kritik sosial bagi pers ini erat kaitannya pada media massa sebagai alat kontrol sosial sesuai fungsi normatifnya. Kritik sosial terhadap suatu isu termasuk penanganan kasus korupsi di Indonesia oleh surat kabar cetak biasa dituliskan lewat teks editorial atau tajuk rencana.

Dengan adanya permasalahan pada penanganan kasus korupsi di Indonesia yang terus-menerus terjadi dan tidak kunjung usai, surat kabar cetak Media Indonesia menghasilkan beberapa teks editorial yang membahas isu tersebut. Teks

editorial yang dihasilkan pun bukan hanya berisi bahasan mengenai adanya kasus korupsi di Indonesia. Media Indonesia juga tidak luput untuk menyematkan kritik sosial dalam penulisan teks editorialnya. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menemukan kritik sosial yang terdapat pada tajuk rencana oleh surat kabar cetak Media Indonesia. Peneliti juga berharap dapat mengklasifikasikan model tajuk rencana oleh surat kabar cetak Media Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Komunikasi massa diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan pada khalayak luas, sementara secara luas diartikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui media tertentu. Media yang termasuk mulai dari cetak, elektronik, dan digital. Walaupun massa diartikan sebagai kerumunan, namun definisi komunikasi massa yang lebih tepat bukanlah berkomunikasi dengan kerumunan, namun komunikasi dilakukan dengan perantara media massa agar dapat menjangkau kerumunan yang luas. Permatasyari (2021), mengatakan jika komunikasi massa bukan komunikasi dengan massa, namun media massa merupakan alat utama dari sistem komunikasi massa itu sendiri. Dengan menggunakan media sebagai perantara, organisasi media sebagai pembuat dan penyebar pesan dapat menjangkau khalayak atau audiens yang besar dan luas.

Adanya komunikasi massa tidak lepas dari peran media massa. Hal tersebut dikarenakan esensi dari media massa adalah sebagai perantara dalam melakukan komunikasi massa. Dengan kata lain, media massa merupakan penghubung kepada masyarakat atau khalayak. Media ini merupakan sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat (Habibie, 2018). Dari berbagai media massa yang diketahui, surat kabar merupakan media massa yang paling tua dan masih bertahan hingga sekarang (Rubeno & Shokheh, 2025, p. 81). Surat kabar diartikan sebagai media komunikasi yang menggunakan bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia populer yang mempunyai sifat khusus berupa singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas (Astuti, 2018, p. 70).

Di dalam surat kabar terkandung banyak informasi yang diproduksi, diolah, dan diatur oleh komunikator dalam hal ini lembaga surat kabar itu sendiri. Atas dasar tersebut, surat kabar memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan khalayak tentang peristiwa yang terjadi di sekitar. Fungsi yang bersifat informatif tersebut merupakan fungsi paling dominan yang dimiliki surat kabar. Kendati demikian, surat kabar juga memiliki fungsi lain untuk mencerdaskan masyarakat dan sarana hiburan. Lebih jauh, surat kabar juga berperan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat (Nurudin, 2011; Alkhajar, 2011; Alkhajar & Sofyan, 2022; Wicaksana & Alkhajar 2024, p. 162). Kemampuan sebagai alat kontrol sosial itu berkaitan dengan jangkaun surat kabar yang cukup luas. Berdasarkan jangkauannya tersebut, surat kabar dibagi menjadi surat kabar lokal, regional, dan nasional.

Dalam surat kabar, terdapat tiga komponen, yaitu penyajian berita, pandangan atau opini, dan yang terakhir adalah periklanan. Penyampaian opini tersebut adalah sarana bagi masyarakat untuk mengetahui ide, gagasan, kritik, dan saran terhadap sebuah sistem sosial. Penyampaian opini kerap dilakukan pada tajuk rencana. Tajuk rencana merupakan ekspresi opini atau pandangan dan sudut pandang media terkait suatu peristiwa yang dibahas dalam surat kabar (Wicaksana, 2024). Lewat tajuk rencana, redaksi media biasa mengungkapkan posisinya dalam

menanggapi suatu peristiwa yang dibahas. Menurut Astuti (2018), mengatakan jika tajuk rencana bukan hanya ungkapan dari media yang mengandung suatu kekhawatiran terhadap suatu peristiwa, namun berisi informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan kata lain, tajuk rencana membawa informasi serta kritik sosial terhadap suatu peristiwa. Lewat tajuk rencana, surat kabar dapat mempengaruhi masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Setiap kalimat dalam tajuk rencana ditulis dengan makna tertentu dan maksud tertentu, serta bisa saja mengandung kritik sosial di dalamnya.

Kritik sosial adalah salah satu bentuk dari komunikasi yang berlangsung di masyarakat dan bertujuan untuk mengontrol sistem sosial atau proses bermasyarakat. Banyak hal yang berkaitan dengan kritik sosial. Salah satunya adalah kritik sosial dilakukan dalam komunikasi massa oleh media massa seperti surat kabar (Rubeno & Shokheh, 2025, p. 87). Dalam pengertian yang lebih luas, menurut Abar (1997, p. 44), menyatakan kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat. Adanya kritik sosial bertujuan mengontrol sebuah sistem sosial atau proses kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, kritik sosial juga berfungsi sebagai wahana untuk menjaga dan melahirkan kembali sebuah sistem sosial atau bermasyarakat. Dengan kata lain, beragam tindakan individu atau masyarakat sosial yang menyimpang dari nilai moral dapat dicegah dengan adanya kritik sosial. Pers tidak hanya membawa fungsi menyampaikan informasi. Akan tetapi, pers juga menyalurkan aspirasi sosial masyarakat. Lebih jauh, kritik sosial bisa membawa kegelisahan, keprihatinan, kemarahan, bahkan kebencian masyarakat. Dengan begitu, pers banyak berbenturan dan berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tinggi yaitu pemerintah atau negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian dengan sifat kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen utama (Sugiyono dalam Nasution, 2023). Sedangkan menurut Niam et al. (2024), penelitian yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks serta menekankan pada proses pemahaman konsep dan proses sosial, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada pengukuran dan analisis data numerik (Niam et al., 2024). Secara sederhana penelitian kualitatif berangkat dari data bisa berupa kata-kata dan bahasa. Jika dibandingkan lebih lanjut dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif mampu menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa diukur dengan pendekatan kuantitatif (Saryono dalam Nasution, 2023).

Adapun terkait dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analisis isi kualitatif. Analisis isi biasa digunakan untuk mempelajari isi media. Media yang dimaksud termasuk pada media cetak seperti surat kabar. Analisis isi pada media cetak tersebut bisa dikatakan juga dimaksudkan untuk mempelajari gambaran isi dan karakteristik pesan yang ada didalamnya (Nurainun, 2017, p. 36). Dengan kata lain, menggunakan analisis isi berarti dapat membuat peneliti berhasil membahas isi suatu media cetak dengan lebih mendalam. Selaras dengan menurut Rustam (2022, p. 34), analisi isi sering digunakan untuk

menganalisis isi media termasuk cetak dengan memanfaatkan dokumen dari media cetak tersebut. Penelitian ini mencoba menemukan makna isi editorial Media Indonesia dan menganalisis hubungan antar teks editorialnya yang semuanya berkaitan atau membahas tentang kasus korupsi di Indonesia. Maka dari itu, peneliti mengelompokkan editorial atau tajuk rencana pada Media Indonesia yang semuanya membahas seputar kasus korupsi di Indonesia. Peneliti menganalisis data yakni isi editorial atau tajuk rencana tersebut guna mengetahui kritik sosial yang ada pada dalam teks terkait pemerintah dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Hasil Penelitian

Peneliti memfokuskan analisis dalam penelitian mengenai kritik sosial yang dituliskan oleh tim redaksi surat kabar cetak Media Indonesia mengenai kasus korupsi di Indonesia.

Rampas Aset tanpa Langgar Hak

Kritik dituliskan dan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini berhubungan dengan pembuatan UU perampasan aset. Disamping menemukan kritik sosial didalamnya, peneliti juga menganalisis adanya argumentasi dan solusi yang disampaikan dalam tajuk rencana pertama ini. Maka dari itu, tajuk rencana berjudul "Rampas Aset tanpa Langgar Hak" masuk ke dalam kategori tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT). Tajuk rencana ini tidak menuliskan kritik yang menimbulkan pertikaian dengan pemerintah namun cenderung mengungkapkan kritik disertai fakta, argumen, dan solusi di dalamnya.

Membagi Uang Korupsi

Teks juga menuliskan solusi untuk bisa memberantas kasus korupsi di Indonesia. Media Indonesia menyatakan jika kasus korupsi yang sudah bagi kanker ganas di Indonesia bisa diampatasi dengan reformasi birokrasi yang dilakukan seutuhnya. Maka dari itu teks ini masuk ke dalam kategori tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT). Media Indonesia beranggapan penanganan kasus korupsi di Indonesia memang sudah lambat ditangani, namun pemerintah masih bisa mengamputasi korupsi bagi kanker ganas ini dengan reformasi birokrasi yang seutuhnya.

Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

Teks yang berjudul "Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi" mengandung kritik sosial yang mengawasi adanya praktik menyeleweng dari pemerintah. Kritik secara khusus dituliskan dan diperuntukkan kepada hakim yang mengadili kasus korupsi. Teks ini dimasukkan ke dalam kategori tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT), karena kritik di dalamnya bersifat menyeimbangkan isu dari berbagai sudut pandang. Walaupun mengandung kritik sosial, di dalam tajuk rencana ini tidak ditemukan kritik sosial yang secara langsung dan tegas berisi perlawanan atau sikap menolak oleh Media Indonesia kepada pemerintah. Sehingga tajuk rencana ini lebih tepat dimasukkan ke dalam tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT) dibandingkan Model Anjing Penjaga (MAP)

Gaji Tinggi bukan Jaminan Tidak Korupsi

Tajuk rencana yang spesifik berjudul "Gaji Tinggi bukan Jaminan Tidak Korupsi" memberikan kritik sosial yang ditujukan pada pemerintah yang memiliki wacana menaikkan gaji kepala daerah dan pengadilan yang menjatuhkan vonis ringan

kepada koruptor. Dalam hal ini pemerintah diminta mengkaji ulang wacana yang ingin menaikkan gaji kepala daerah untuk mencegah tindakan korupsi. Tajuk rencana ini masuk ke dalam tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT). Hal ini dikarenakan kritik sosial dibangun dengan tidak menimbulkan pertikaian dan juga dengan menyematkan solusi didalamnya.

Pisau Dapur Hakim Tipikor

Tajuk rencana ini masuk ke dalam kategori tajuk rencana Model Jalang Tengah (MJT). Hal tersebut dikarenakan memberikan kritik dengan nada yang jauh dari pertikaian. Selain itu, Media Indonesia juga mempertimbangkan isu dari berbagai sudut pandang. Hal ini dilihat dari Media Indonesia yang juga menuliskan alasan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis hukuman. Dengan menuliskan alasan tersebut, tajuk rencana ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tajuk rencana Model Anjing Penjaga (MAP).

Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

Kritik sosial dalam tajuk rencana berjudul "Lagu Lama Korupsi Infrastruktur" tidak memancing pertikaian dengan pemerintah. Dengan kata lain Media Indonesia mengharapkan situasi penanganan kasus korupsi yang lebih baik tetapi tidak secara langsung menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah. Media Indonesia tidak lupa menuliskan solusi dalam tajuk rencana ini. Berdasarkan alasan tersebut, tajuk rencana ini dimasukkan pada tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT).

Musim Potong Hukuman Koruptor

Tajuk rencana "Musim Potong Hukuman Koruptor" menyampaikan argumentasi dan solusi. Di samping itu Media Indonesia juga mengajak masyarakat untuk tetap tegas dalam perang melawan korupsi. Maka dari itu, tajuk rencana ini termasuk ke dalam tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT). Media Indonesia dalam tajuk rencana ini tidak menuliskan kritik yang menimbulkan pertikaian dengan pemerintah. Media Indonesia juga tidak menuliskan penolakan atau ketidaksetujuan terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia secara langsung. Media Indonesia memilih menuliskan kritik sosial dibarengi dengan argumentasi yang menyeimbangkan isu dari berbagai sudut pandang.

Kesimpulan

Peneliti menemukan kritik sosial yang terkandung ke dalam beberapa teks editorial atau tajuk rencana oleh Media Indonesia. Kritik sosial tersebut spesifik berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Melalui kritik sosial, media menjalankan fungsi normatif menjadi alat kontrol terhadap masalah-masalah yang ada di sosial termasuk korupsi. Peneliti menangkap adanya perhatian dan ketertarikan yang dimiliki oleh Media Indonesia terhadap isu korupsi dalam hal ini adalah penanganan kasus korupsi di Indonesia. Melalui tajuk rencananya, Media Indonesia mengharapkan praktik penanganan kasus korupsi yang lebih baik di Indonesia. Kritik sosial yang dituliskan dalam tajuk rencana oleh Media Indonesia menandakan bahwa Media Indonesia menjalankan fungsi normatifnya sebagai alat kontrol sosial. Media Indonesia mengkritik penanganan kasus korupsi di Indonesia dan ditujukan pada berbagai pihak, seperti rezim pemerintah, lembaga penegak hukum, bahkan pejabat negara. Hal tersebut menandakan jika Media Indonesia menuliskan kritik sosial dengan menghadirkan bahasan yang tidak menghakimi satu

pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang Media Indonesia fokus dalam mengkritik penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Peneliti menangkap keseluruhan teks editorial atau tajuk rencana yang mengandung kritik sosial terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia pada surat kabar cetak Media Indonesia pada periode Mei – Juli 2025 dikategorikan ke dalam tajuk rencana Model Jalan Tengah (MJT). Peneliti menangkap hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimana peneliti menggunakan metode analisis isi kualitatif. Surat kabar Media Indonesia menuliskan kritik sosial dengan dibarengi fakta dan data terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Di samping itu dalam tajuk rencananya Media Indonesia tidak menyindir, menyampaikan penolakan, atau ketidaksetujuan secara langsung pada pemerintah terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, Media Indonesia menghindari pertikaian atau konfrontasi langsung dengan pemerintah. Ditambah lagi, Media Indonesia tidak hanya menyampaikan kritik sosial namun juga mencoba memberikan solusi terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abar, A. Z. (1997). Kritik sosial, pers, dan politik Indonesia. *Unisia*, 17(32), 44-51.
- Astuti, D. P. J. (2018). Analisis teks retorika tajuk rencana pada surat kabar kompas edisi januari 2017. *Wacana Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 16(1), 70-86.
- Ginanjar, R. P. A. (2025, March 12). Daftar 4 kasus korupsi yang terungkap di awal 2025. *Tempo.co*. Diambil dari [https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-a wal-2025-1218482](https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482)
- Habibie, D. K. (2018). Dwi fungsi media massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79-86.
- Nasution, A. F. (2023, Januari). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Harga Creative.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., Fathin, S., Mola, M. S.R., Syaifudin, A. A., & Wajdi, F. (2024, Maret). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nurainun, A. (2017). *Analisis perbandingan isi tajuk rencana surat kabar (studi deskriptif tentang isi tajuk rencana surat kabar harian analisa dan waspada edisi 1-31 agustus 2016)* [Skripsi].
- Permatasyari, A. (2021). Perkembangan Komunikasi Massa. *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa*, 18-31.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24.
- Rubeno, I., & Shokheh, M. (2025). How the newspaper became a medium of social criticism in Indonesia 1966-1974. *Journal of Indonesian History*, 13(1), 80-97.
- Rustam, M. (2022). Analisis isi pro kontra pemberitaan media massa di harian fajar terhadap kebijakan di rumah saja. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 33-43.
- Wicaksana, R. A., & Alkhajar, E. N. S. (2024). Kritik sosial pers terhadap pemerintah terkait polusi udara di DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi Massa*, 17(1), 158-162.